

Dok L. 03/ 22/01/2021

LAPORAN KINERJA

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman
Perkebunan Ambon Tahun 2020



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Ambon, 22 Januari 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

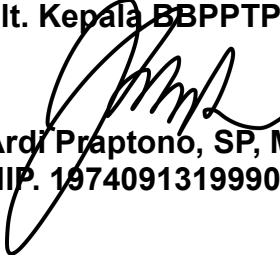
Laporan Kinerja ini memuat tentang 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 4) Bab IV Penutup.

Kami menyadari bahwa LAKIN Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan ini.

Ambon, 19 Januari 2020

Plt. Kepala BBPPTP Ambon



Ardi Praptono, SP, M.Agr
NIP. 197409131999031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2020 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon sebagaimana dimatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 06 Pebruari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Penyusunannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No : 239/1A/6/8/2003, tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

Pagu alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 74.324.066.000 dan direvisi menjadi Rp. 23.906.547.000,- dikarenakan adanya refocussing anggaran covid19. Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2020 sebesar Rp.23.693.406.232,- atau sebesar (95%). Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yakni Desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan (1 desa) terealisasi sebesar 100 %, penyediaan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan (500.000 batang) terealisasi sebesar 100%, Modernisasi proteksi tanaman perkebunan (12 paket teknologi direvisi menjadi 1 paket teknologi) terrealisasi sebesar 66 %, layanan sarana dan prasarana internal (1 layanan) terrealisasi sebesar 100 %, layanan dukungan manamejen satker (1 layanan) terrealisasi sebesar 97 %. Layanan perkantoran (1 layanan) terrealisasi sebesar 91%, nursery (3 unit) terrealisasi sebesar 99 %.

Secara garis besar, kegiatan tahun 2020 mengalami degradasi

yang cukup signifikan disebabkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic covid 19. Hal ini mengakibatkan kegiatan lapangan, pertemuan pembinaan dengan kelompok tani, pengawalan kegiatan perbenihan dan proteksi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	3
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan	
2.1.1. Visi	3
2.1.2. Misi	4
2.1.3. Tujuan BBPPTP Ambon.....	5
2.1.4. Sasaran BBPPTP Ambon.....	7
2.1.5. Arah Kebijakan BBPPTP Ambon.....	7
2.1.6. Program BBPPTP Ambon.....	10
2.1.7. Fokus Kegiatan BBPPTP Ambon.....	10
2.1.8. Strategi BBPPTP Ambon.....	11

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	
2.2.1. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Pengukuran Kinerja.....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	15
3.3. Realisasi Anggaran.....	22
3.4. Realisasi Anggaran berdasarkan Output Kegiatan..	24
3.5. Permasalahan Umum.....	22
3.6. Isu Strategis Yang perlu ditindaklanjuti.....	24
3.7. Permasalahan Umum Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	34
4.1. Kesimpulan.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegiatan dan Output BBPPTP AMBON Tahun 2020.....	10
Tabel 2	Sasaran Indikator Kinerja dan target.....	12
Tabel 3	Capaian Kinerja BBPPTP Ambon.....	14
Tabel 4	Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan.....	23
Tabel 5	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	24
Tabel 6	Permasalahan dan Saran Rekomendasi.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BBPPTP Ambon sebagai UPT Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, menjalankan tugas melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam tahun anggaran 2020, program yang diamanatkan untuk dilaksanakan yakni Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

Sebagai penjabaran program tersebut, maka BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan yaitu Desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, penyediaan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan, modernisasi proteksi tanaman perkebunan, layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen. Layanan perkantoran, nursery. Output atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih

tanaman perkebunan, terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dan terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Perkebunan

2.1.1. Visi

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dan Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu **“Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun dan memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”**

2.1.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan
3. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan
4. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani
5. Mewujudkan peningkatan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman perkebunan secara berkelanjutan
6. Menyediakan fasilitasi bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

7. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan
8. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan.

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi dan guna mendukung visi dan misi pembangunan tersebut diatas maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul.
- 2) Meningkatkan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas.

- 3) Mengembangkan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*).
- 4) Meningkatkan ketersediaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan dan musuh alaminya.
- 5) Meningkatkan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT dan non OPT serta faktor yang mempengaruhi.
- 6) Mengembangkan teknik dan metode *surveillance*, pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan.
- 7) Mengembangkan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan serta PHT.
- 8) Meningkatkan uji pemanfaatan pestisida.
- 9) Meningkatkan pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 10) Terwujudnya sistem manajemen informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

- 11) Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
- 12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 13) Meningkatkan pelayanan organisasi

2.1.4. Sasaran

Outputs atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.5. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah: “Memperkuat SDM dan fasilitas

laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan serta fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”. Kebijakan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu :

- 1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Dimaksudkan untuk menjadikan SDM yang profesional sehingga mampu melaksanakan pelestarian danperkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan petugas serta pendampingan bagi petani.
- 2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.

3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, sehingga pelaksanaan pelestarian danperkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut ditempuh upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.
- Meningkatkan upaya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.
- Membantu upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan PHT ramah lingkungan bagi petani.

4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi. Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
- Pengembangan dan pematapan data base perbenihan dan proteksi.

2.1.6. Program

Program Utama BBPPTP Ambon mengacu kepada program Ditjen Perkebunan, yaitu Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

2.1.7. Fokus Kegiatan

Sebagai penjabaran program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, maka BBPPTP Ambon melaksanakan kegiatan yaitu penanganan OPT perkebunan, pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan, memfasilitasi kegiatan sertifikasi benih (jumlah benih yang bersertifikat dan berlabel), produksi benih dan penyaluran benih bersertifikat lewat pemanfaatan nursery modern dan meningkatkan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan, menyelenggarakan pelayanan organisasi yang berkualitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan dan output BBPPTP Ambon Tahun 2020

No	Kode Nama Kegiatan	Output
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan		
1	1779.003 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (Desa)	1 Desa
1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan		
1	1781.001 Penyediaan, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Batang)	500.000 batang
2	1781.002 Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	1 paket
3	1781.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1 Layanan
4	1781.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1 Layanan
5	1781.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1 Layanan
6	5890.001 Nursery (Unit)	3 Unit

2.1.8. Strategi

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Balai antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga fungsional sesuai kebutuhan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan media audio visual.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.
- 5) Pengembangan dan pematapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kegiatan Pembangunan Perkebunan 2020

Kegiatan : Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan . (BBPPTP) Ambon Pagu alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 74.324.066.000 dan direvisi menjadi Rp. 23.906.547.000,- dikarenakan adanya refocussing anggaran covid19.

Tabel 2. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan	4 Metode
2	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan	3 paket teknologi
3	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan	3 rekomendasi
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah temuan BPK pengelolaan keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang terjadi berulang	0 temuan
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah Temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi perencanaan, pengkuruan, pelaporan kinerja,	0 temuan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja BBPPTP Ambon disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis BBPPTP Ambon sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

Capaian Kinerja sesuai Penetapan Kinerja BBPPTP Ambon disajikan dalam tabel berikut ini

**Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2020 sesuai Penetapan Kinerja
BBPPTP Ambon dan beberapa tahun sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun									Kriteria
			2018			2019			2020			
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan (Metode)	4	3	75	4	4	4	9	100	Berhasil	
2	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan (Paket Teknologi)	12	12	100	12	12	3	3	100	Berhasil	
3	Meningkatnya Pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)	12	12	100	3	3	3	5	100	Berhasil	
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah temuan BPK pengelolaan keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang terjadi berulang (temuan)	1	0		3	0	0	0	100	Berhasil	
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon	Jumlah Temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup BBPPTP Ambon	1	0		6	0	0	0	100	Berhasil	

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sesuai yang diamanahkan dalam PermenPAN&RB Tahun 2014, Laporan Kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran);

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan (metode)
 - a. Capaian kinerja pengujian mutu benih sebanyak 4 metode yang dikembangkan dari target 4 metode dan masuk dalam kategori berhasil yaitu : Pengujian kadar air pada pala, pengujian kadar air cengkih, pengujian viabilitas benih, standarisasi daya berkecambah pala.
 - b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir kegiatan masih tetap sama untuk metode pengujian
 - c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terjadinya pergeseran musim panen sehingga berpengaruh pada ketersediaan contoh uji untuk pengembangan metode uji. Hal ini menyebabkan metode yang dikembangkan belum dapat divalidasi

d. Analisis penggunaan sumber daya

Petugas pengawas benih tanaman sebagai analisis tersedia namun kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pengujian dan pengembangan metode uji perlu ditingkatkan terus menerus.

2. Jumlah perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan (Paket Teknologi):

a. Capaian kinerja perakitan teknologi spesifik lokasi target 3 paket teknologi realisasinya 3 paket teknologi dan masuk dalam kategori berhasil

1. Teknologi rearing hama *Bactocera hercules* dengan menggunakan pakan alternative cocopeat, serbuk sagu dan serbuk batang pala

2. Teknologi rearing hama penggerek *Corcocertus bigantatus* dengan menggunakan pala alternative buah apel, labu dan tape singkong

3. Teknologi pengendalian penyakit busuk buah kakao menggunakan metabolit sekunder *Trichoderma koningii* dengan cara infus akar

b. Bila dibandingkan dengan kegiatan tahun 2019

rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 12 paket teknologi sedangkan 2020 sebanyak 3 paket teknologi.

- c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan tahun 2020 dibatasi karena terjadi pandemic covid 19. Kegiatan yang semula dilaksanakan di lapangan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan skala besar yang diberlakukan dalam tahun 2020. Untuk mengantisipasinya maka rakitan teknologi proteksi dilaksanakan pada skala laboratorium.
- d. Analisis penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat rakitan teknologi spesifik lokasi. Disamping itu peralatan laboratorium perlu terus diupgrade untuk mendapatkan teknologi yang akurat dan valid ditingkat laboratorium. Metode pengujian yang digunakan di validasi agar mendapatkan metode baku

- 3. Jumlah metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan
 - a. Capaian kinerja metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan sebanyak

5 metode dari target 5 metode dan masuk dalam kategori berhasil yaitu :

- 1) Metode uji kerapatan spora dan viabilitas agens pengendalian hayati golongan jamur
 - 2) Metode eksplorasi, identifikasi, koleksi serangga OPT dan musuh alami
 - 3) Penetapan model peramalan OPT kelapa, kakao, tebu dan kopi lingkup wilker BBPPTP Ambon.
 - 4) Metode pengendalian larva *Oryctes rhinoceros* dengan menggunakan *Metarhizium anisopliae* pada dosis 100 gr/800 media pakan secara invitro
 - 5) Metode penentuan nilai konsentrasi hambatan minimum metabolit serkunder *Trichoderma koningii* terhadap pertumbuhan bercak pathogen busuk buah kakao
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi yaitu metode yang dihasilkan harus dilakukan validasi metode uji untuk mendapatkan metode standar.
- c. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat rakitan

teknologi yang memadai ditingkat petani. Guna menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas POPT.

4. Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)
 - a. Capaian kinerja rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan sebanyak 3 rekomendasi dengan realisasi sebanyak 5 rekomendasi dan masuk dalam kategori berhasil yaitu
 - 1) Sertifikasi benih tanaman perkebunan komoditi pala, cengkih, kakao dan tebu dari target sebanyak 500.000 batang, terealisasi sebanyak 1.725.879 batang.
 - 2) Rekomendasi teknis kebun sumber benih tanaman pala sebanyak 11 BPT, 176 PIT
 - 3) Rekomendasi teknis kebun sumber benih tanaman cengkih sebanyak 9 BPT, 94 PIT
 - 4) Rekomendasi kelayakan produsen benih sebanyak 14 rekomendasi.
 - 5) Rekomendasi teknik proteksi tanaman perkebunan

yang dihasilkan BBPPTP Ambon tahun 2020 yaitu 48 sertifikat hasil Uji Mutu APH

- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2018 ataupun 2019
 - c. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kondisi pandemic menyebabkan sertifikasi benih di lapangan dilakukan secara virtual. Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan kebun sumber benih mengalami hambatan karena PSBB namun diakhir tahun dapat diselesaikan. Permohonan sertifikasi uji mutu di laboratorium mengalami penurunan karena jumlah pemohon uji mutu benih menurun.
 - d. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk mendapat rakitan teknologi yang memadai ditingkat petani. Guna menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas POPT dan PBT
6. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang terjadi berulang (temuan) targetnya 0 temuan realisasi 0

temuan dikategorikan berhasil karena tidak ada temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPPTP Ambon yang terjadi secara berulang.

7. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang yang targetnya 0 temuan realisasinya 0 temuan. Capaian kinerjanya sebesar 100% karena tidak adanya temuan itjen atas impelmentasi SAKIP yang terjadi secara berulang.

3.3 Realisasi Anggaran

Pagu alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 74.324.066.000 dan direvisi menjadi Rp. 23.906.547.000,- dikarenakan adanya refocussing anggaran covid19. Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2020 sebesar Rp.23.693.406.232,- atau sebesar (95%). Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yakni Desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan (1 desa) terealisasi sebesar 100 %, penyediaan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan (500.000 batang) realisasi sebesar 100%, Modernisasi proteksi tanaman perkebunan (1 paket teknologi) realisasi sebesar 66 %, layanan sarana dan prasarana internal (1 layanan) realisasi sebesar 100 %, layanan dukungan manamejen satker (1 layanan) realisasi sebesar 97 %. Layanan perkantoran (1 layanan)

realisasi sebesar 91%, nursery (3 unit) realisasi sebesar 99 %.

Secara garis besar, kegiatan tahun 2020 mengalami degradasi yang cukup signifikan disebabkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic covid 19. Hal ini mengakibatkan kegiatan lapangan, pertemuan pembinaan dengan kelompok tani, pengawalan kegiatan perbenihan dan proteksi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu terjadi refocusing anggaran, dan terlambatnya pencairan dana kegiatan di akhir tahun karena revisi pagu minus.

Tabel 4. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan

Kode	Uraian	Anggaran			Output/ Fisik (%)
		Pagu	Realisasi	%	
003	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	170.690.000	169.900.000	99,54	100
001	Penyediaan, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Batang)	321.400.000	320.928.575	99,85	100
002	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	209.426.000	137.326.025	65,57	74,5
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	6.354.320.000	6.342.361.700	99,81	100
970	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	2.701.650.000	2.625.209.664	97,17	100
994	Layanan Perkantoran (Layanan)	11.337.268.000	10.321.173.568	91,04	100
001	Nursery (Unit)	2.811.793.000	2.776.506.700	98,75	100

Posisi Desember 2020

Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2020 sebesar Rp.23.693.406.232,- atau sebesar (95%) bila dibandingkan dengan Realisasi penyerapan anggaran 2019 sebesar Rp. 18.693.238.915,- atau sebesar (98,50%) tidak terdapat peningkatan realisasi

Tabel 5. Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Belanja

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
1	51 BELANJA PEGAWAI	10.526.096.000	9.586.774.043	94,0%
2	52 BELANJA BARANG	4.802.248.000	4.547.046.089	94,6%
3	53 BELANJA MODAL	8.578.203.000	8.559.586.100	99,7%

Sumber : (SMART Kemenkeu)

Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 94% dengan capaian fisik sebesar 100%.
2. Belanja Barang terealisasi sebesar 94,6% dengan capaian fisik sebesar 100%.
3. Belanja Modal terealisasi sebesar 99,7% dengan capaian fisik sebesar 100%.

3.4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan

Secara umum capaian output kegiatan BBPPTP Ambon adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - a) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dengan serapan sebesar 100% dan capaian fisik sebesar 100%. areal yang diorganikkan seluas 754 ha, dari target 250 ha atau meningkat 300%. Jumlah petani yang terlibat 539 orang dari 8 ICS.
- 2) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
 - a) Penyediaan, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 100 % dan capaian fisik sebesar 300%,
 - b) Modernisasi proteksi Tanaman Perkebunan serapan sebesar 66 % dan capaian fisik sebesar 100%, dengan 3 paket teknologi terapan
 - c) Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar 100% dan capaian fisik sebesar 100%

- d) Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan serapan sebesar 97% dan capaian fisik sebesar 100%
- e) Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 91% dan capaian fisik sebesar 100%
- f) Nursery dengan serapan 99% dengan capaian realisasi Fisik sebesar 100%

3.5 Permasalahan umum realisasi anggaran tahun 2020

- a. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan untuk mengendalikan pandemic berakibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020 antara lain :
 - Pembatasan jumlah pegawai yang masuk kantor mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan
 - Jumlah pemohon/pemangku kepentingan yang dilayani oleh Balai berkurang
 - Adopsi teknologi ditingkat petani mengalami hambatan karena kegiatan proteksi dan perbenihan di lapangan dibatasi.
 - Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal palang karena beberapa kali revisi anggaran akibat *refocusing*.
- b. Pengelolaan database dalam rangka penyediaan data

dan informasi yang valid terkendala karena terjadi revisi sehingga tidak dapat dimaksimalkan

- c. Sarana dan prasarana laboratorium perlu ditingkatkan untuk mendukung pengujian.
- d. Layanan virtual belum dapat berfungsi secara maksimal. Disebabkan karena akses jaringan internet belum dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung layanan secara virtual. Disamping itu petani belum terbiasa mengakses layanan secara virtual. Petugas layan perlu ditingkatkan kompetensinya untuk memberikan layanan. Untuk mengantisipasinya perlu dimaksimalkan jaringan internet, melaksanakan sosialisasi layanan virtual dan meningkatkan kompetensi petugas layanan.
- e. Contoh uji pengujian mutu benih di laboratorium mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengambilan contoh uji tidak maksimal. Selain itu produsen benih tidak aktif mengajukan permohonan pengujian mutu karena belum diterapkannya persyaratan dalam pengujian mutu di laboratorium sebagai dasar produksi benih. Untuk mengantisipasinya maka dokumen permohonan sertifikasi mutu layak edar perlu ditambahkan dengan hasil pengujian mutu di laboratorium
- f. Pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di wilayah kerja

diawal masa pandemic sampai dengan akhir tahun. Kegiatan pengawasan peredaran benih hanya dapat dilaksanakan pada lokasi perederan benih yang terdekat. Untuk mengantisipasi hal ini maka ditingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha perbenihan dan masyarakat penerima benih.

3.4 Isue Strategis Yang Perlu Ditindaklanjuti

- a. Meningkatkan mutu layanan internal dan eksternal

Mutu layanan ditingkatkan dengan memaksimalkan jaringan internet lingkup balai, meningkatkan kompetensi petugas layanan, menyempurkan prosedur layanan internal dan eksternal

- b. Pengelolaan data base

Mekanisme pengelolaan database benih dan proteksi perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, tepat waktu, valid dan dapat dipercaya serta memudahkan pemangku kepentingan mengakses data lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan.

- c. Adopsi teknologi proteksi tanaman perkebunan

Kedepan diharapkan kegiatan kajian dapat menghasilkan ditingkat laboratorium dapat diterapkan di lapangan untuk mendapatkan teknologi terapan pengendalian OPT ramah lingkungan, biaya rendah dan mudah diaplikasikan di tingkat petani. Salah satu cara untuk menerapkan hal tersebut dengan membangun lebih banyak demplot PHT untuk pengendalian OPT

d. Benih bersertifikat dan berlabel.

Pengawasan terhadap benih bersertifikat dan berlabel walaupun sebagian besar dilaksanakan secara virtual masih perlu ditingkatkan dengan mengurangi peredaran benih yang ilegal, meningkatkan jumlah produsen benih yang memiliki ijin produksi benih, meningkatkan jumlah kebun sumber benih (KI,BPT,PIT) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Diharapkan tugas PPNS tidak sebatas peninjauan saja tetapi perlu kerjasama dengan membuat pos penjagaan demi menghindari proses peredaran benih tanaman perkebunan yang legal maupun ilegal sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dilain pihak perlu diberlakukan sangsi yang tegas bagi pelaku yang

melanggar peraturan perbenihan perkebunan, perlu membangun kerjasama dengan instansi terkait yang berada di wilayah kerja agar bisa mencegah peredaran benih palsu dan perlunya dibangun pos penjagaan di daerah yang sering terjadi peredaran dan guna memperancar proses penyidikan perlu dibuat format berita acara sebagai pegangan bagi petugas bila didapatkan keganjalan dalam proses peredaran benih.

Tabel 5. permasalahan dan saran rekomendasi peningkatan

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	DAMPAK	UPAYA YG DILAKUKAN	SARAN REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembatasan jumlah pegawai yang masuk kantor	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan untuk mengendalikan pandemic berakibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020	Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan	memaksimalkan kinerja pegawai dengan	melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai	Kepala Balai
2	Jumlah pemohon/pemangku kepentingan yang dilayani oleh Balai berkurang		kinerja layanan menurun	meningkatkan layanan virtual	melakukan sosialisasi layanan virtual	Kepala Balai
3	Adopsi teknologi ditingkat petani mengalami hambatan karena kegiatan proteksi dan perbenihan di lapangan dibatasi.		kinerja layanan menurun	meningkatkan layanan virtual terkait adopsi teknologi proteksi dan benih	melakukan sosialisasi layanan virtual	Kepala Balai
4	Realisasi anggaran tidak sesuai jadwal palang karena beberapa kali revisi anggaran akibat <i>refocusing</i> .		Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan	memaksimalkan kegiatan di akhir tahun	realisasi anggaran harus sesuai dengan jadwal yang telah disepakati	PPK
5	Pengelolaan database dalam rangka penyediaan data dan informasi tidak maksimal		revisi sehingga tidak dapat dimaksimalkan	database tidak terbaru	menyusun usulan peningkatan di tahun yang akan datang	usulan peningkatan pengelolaan data base

6	Sarana dan prasarana laboratorium belum maksimal untuk mendukung pengujian.	revisi sehingga tidak dapat dimaksimalkan	kinerja layanan menurun	menyusun usulan peningkatan di tahun yang akan datang	usulan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium	Koordinator kelompok substansi
NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	DAMPAK	UPAYA YG DILAKUKAN	SARAN REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
7	Layanan virtual belum dapat berfungsi secara maksimal.	akses jaringan internet belum dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung layanan secara virtual. Disamping itu petani belum terbiasa mengakses layanan secara virtual. Petugas layan perlu ditingkatkan kompetensinya untuk memberikan layanan.	Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan	menyusun usulan peningkatan di tahun yang akan datang	memaksimalkan jaringan internet, melaksanakan sosialisasi layanan virtual dan meningkatkan kompetensi petugas layanan.	Koordinator kelompok substansi
8	Contoh uji pengujian mutu benih di laboratorium mengalami penurunan.	Kegiatan pengambilan contoh uji tidak maksimal. Selain itu produsen benih tidak aktif mengajukan permohonan pengujian mutu karena belum diterapkannya persyaratan dalam pengujian mutu di laboratorium sebagai dasar sertifikasi benih.	kinerja layanan menurun	Dokumen permohonan sertifikasi mutu layar edar perlu ditambahkan dengan hasil pengujian mutu di laboratorium	melakukan sosialisasi layanan pengujian laboratorium dan proses sertifikasi secara virtual	Koordinator kelompok substansi

9	Pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di wilayah kerja diawal masa pandemic sampai dengan akhir tahun. Kegiatan pengawasan peredaran benih hanya dapat dilaksanakan pada lokasi peredaran benih yang terdekat.	Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan untuk mengendalikan pandemic berakibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020	benih yang beredar tidak terjamin standar mutunya	meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha perbenihan dan masyarakat penerima benih.	melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan petugas yang mengawasi pintu masuk keluar transportasi benih	Kepala Balai
---	---	---	---	--	---	--------------

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pagu alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 74.324.066.000 dan direvisi menjadi Rp. 23.906.547.000,- dikarenakan adanya refocussing anggaran covid19. Realisasi penyerapan anggaran periode s/d Desember 2020 sebesar Rp.23.693.406.232,- atau sebesar (95%). Dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yakni Desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan (1 desa) terealisasi sebesar 100 %, penyediaan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan (500.000 batang) terealisasi sebesar 100%, Modernisasi proteksi tanaman perkebunan (12 paket teknologi direvisi menjadi 1 paket teknologi) terrealisasi sebesar 66 %, layanan sarana dan prasarana internal (1 layanan) terrealisasi sebesar 100 %, layanan dukungan manamejen satker (1 layanan) terrealisasi sebesar 97 %. Layanan perkantoran (1 layanan) terrealisasi sebesar 91%, nursery (3 unit) terrealisasi sebesar 99 %.

Secara garis besar, kegiatan tahun 2020 mengalami degradasi yang cukup signifikan disebabkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemic covid 19. Hal ini mengakibatkan kegiatan lapangan, pertemuan pembinaan

dengan kelompok tani, pengawalan kegiatan perbenihan dan proteksi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu terjadi refocusing anggaran, dan terlambatnya pencairan dana kegiatan di akhir tahun karena revisi pagu minus.

Mengantisipasi hal tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional kegiatan khususnya di yakni sertifikasi mutu benih dilaksanakan secara virtual, begitu pula dengan kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang diselenggarakan secara virtual, memaksimalkan kegiatan pengujian di laboratorium dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai pengganti kegiatan pengujian di lapangan, meningkatkan penggunaan layanan dan penyebaran informasi secara virtual lewat website, media social dan layanan si ben mepet ima.

Pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh BBPPTP Ambon dalam tahun anggaran 2020, yakni jumlah teknologi dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan sebanyak 4 metode, jumlah rakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan sebanyak 3 paket teknologi, jumlah metode dibidang perbenihan yang dihasilkan sebanyak 5 metode, jumlah rekomendasi teknis perbenihan dan proteksi yang dihasilkan sebanyak 5 rekomendasi, jumlah temuan BPK pengelola keuangan yang terjadi berulang sebanyak 0 temuan dan jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang sebanyak 0 temuan.

